

ABSTRAK

Arman (016599220033)

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MAKELAR DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

(xi + 144 halaman)

Latar belakang penelitian ini muncul dari keprihatinan terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat peran makelar dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga. Persaingan usaha yang tidak sehat, seperti persekongkolan tender dan tindak pidana korupsi, menjadi isu utama yang memerlukan penanganan mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persoalan hukum terkait pertanggungjawaban hukum terhadap makelar dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil studi membuktikan bahwa kedudukan makelar dalam pengadaan barang dan jasa dianggap strategis, namun Pertanggungjawaban hukum terhadap makelar dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga, dievaluasi dari perspektif UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar yang kokoh untuk pemberantasan praktik korupsi. Dengan penetapan pidana denda dan pidana penjara, undang-undang ini memberikan sinyal tegas bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi perilaku yang merugikan keuangan negara. Sanksi ini bukan hanya sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif, melainkan juga sebagai tekanan pada pelaku bisnis, termasuk makelar, untuk menjalankan praktik yang transparan, adil, dan sesuai dengan aturan hukum. Penerapan sanksi hukum terhadap makelar diharapkan mampu menciptakan efek jera, meningkatkan integritas, dan membentuk lingkungan bisnis yang bebas dari praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Referensi: 119 (1983-2024)

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, makelar, pengadaan barang dan jasa, korupsi

ABSTRACT

Arman (016599220033)

“LEGAL RESPONSIBILITY FOR BROKERS IN PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN MINISTRIES/INSTITUTIONS VIEWED FROM AN ERADICATION PERSPECTIVE CORRUPTION CRIMES”

(xi + 144 pages)

The background of this research arises from concerns regarding legal issues arising from the role of brokers in the procurement practices of goods and services in Ministries/Agencies. Unhealthy business competition, such as collusion in tenders and acts of corruption, emerges as a primary issue requiring in-depth handling. The aim of this research is to analyze legal issues related to the legal accountability of brokers in the procurement practices of goods and services in Ministries/Agencies from the perspective of combating corruption. The research utilizes a normative juridical method through literature review. The study's findings demonstrate that the position of brokers in the procurement of goods and services is considered strategic. However, legal accountability of brokers in the procurement of goods and services in Ministries/Agencies, evaluated from the perspective of Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption, provides a solid foundation for combating corrupt practices. With the imposition of fines and imprisonment, this law sends a clear signal that the government is serious about addressing behavior that harms the state's finances. These sanctions serve not only as effective instruments for preventing corruption but also as pressure on business actors, including brokers, to conduct transparent, fair practices in accordance with legal regulations. The implementation of legal sanctions against brokers is expected to create a deterrent effect, enhance integrity, and foster a business environment free from corrupt practices in the procurement processes of goods and services.

References: 119 (1983-2024)

Keywords: legal accountability, brokers, procurement of goods and services, corruption